Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen
Volume 8 Nomor 2, 2024
ISSN : 2614-2147

Analisis Multidimensi Kemiskinan Rumah Tangga Di Provinsi Aceh: Pendekatan Ekonometrika dan Indeks IPM dengan Data Mikro Ekonomi

Fajri Hadi[a], Fatmayanti[b], Muhammad Rahmat Hidayat[c], Rusdi[d]
[a,b,c,d.]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teuku Umar

Corresponding Author: fajrihadi@utu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to investigate the multidimensional determinants of household poverty in Aceh by integrating socio-economic, housing, health, and family structure indicators. The research employs a binary logistic regression model using household-level data collected from various districts in Aceh. Eleven independent variables were analyzed, including housing conditions, access to health services, nutritional status of children, and family dynamics such as marital status and social support after divorce. Model validity was tested using the Hosmer–Lemeshow goodness-of-fit and Nagelkerke R^2. The results reveal that all eleven indicators significantly influence household poverty status. Inadequate housing (OR = 4.963), lack of access to healthcare (OR = 3.184), and having malnourished children (OR = 2.622) are among the strongest predictors. Furthermore, divorced household heads without social support (OR = 2.352) are more likely to be trapped in poverty. The model explains 28.4% of the variance in poverty status (Nagelkerke R^2 = 0.284) and passes the goodness-of-fit test (p = 0.623).

Keywords: Multidimensional poverty, Logistic regression, Stunting, Housing deprivation, Social support, Aceh, Malnutrition

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan multidimensi yang memengaruhi status kemiskinan rumah tangga di Provinsi Aceh dengan mengintegrasikan indikator sosial-ekonomi, kondisi perumahan, akses kesehatan, dan struktur keluarga. Penelitian ini menggunakan model regresi logistik biner dengan data rumah tangga dari berbagai kabupaten/kota di Aceh. Sebelas variabel independen dianalisis, mencakup kondisi perumahan, akses terhadap layanan kesehatan, status gizi anak, serta dinamika keluarga seperti status perceraian dan ketiadaan dukungan sosial pasca-cerai. Validitas model diuji menggunakan goodness-of-fit Hosmer–Lemeshow dan nilai Nagelkerke R^2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesebelas indikator berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga. Rumah tidak layak huni (OR = 4,963), tidak memiliki akses layanan kesehatan (OR = 3,184), dan balita bergizi buruk (OR = 2,622) merupakan prediktor terkuat. Selain itu, kepala keluarga berstatus cerai tanpa dukungan sosial (OR = 2,352) memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami kemiskinan. Model ini mampu menjelaskan 28,4% variabilitas status kemiskinan (Nagelkerke R^2 = 0,284) dan lolos uji kecocokan model (p = 0,623).

Kata Kunci: *Kemiskinan multidimensi, Regresi logistik, Stunting, Deprivasi perumahan, Dukungan sosial, Aceh, Malnutrisi*

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai indikator pembangunan manusia. Hal ini terlihat dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh, yang dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 tumbuh rata-rata sebesar 0,70 persen per tahun. IPM Aceh naik dari 73,29 pada tahun 2020 menjadi 75,36 pada tahun 2024, menempatkan provinsi ini dalam

kategori pembangunan manusia tinggi dan berada di peringkat ke-11 nasional serta kelima di Pulau Sumatera. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Namun demikian, pencapaian makro ini belum sepenuhnya mencerminkan realitas yang dihadapi oleh rumah tangga secara mikro, terutama dalam konteks kemiskinan multidimensi.

Pembangunan manusia yang tinggi tidak serta-merta menghapus persoalan struktural yang melekat dalam masyarakat, khususnya kemiskinan yang kompleks dan saling berkelindan antar dimensi (Agustin, 2023). Data ekonomi mikro Aceh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang tantangan sosial ekonomi yang masih dihadapi (Machfud et al., 2021). Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, seperti tercatat pada kuartal I 2023 sebesar 4,2%, dan peningkatan pendapatan per kapita di sejumlah wilayah. Namun di sisi lain, tingkat inflasi yang relatif tinggi dibandingkan nasional, seperti inflasi tahunan 5,52% pada 2023, menunjukkan tekanan biaya hidup yang signifikan, khususnya bagi rumah tangga miskin. Inflasi dipicu oleh lonjakan harga kebutuhan pokok seperti beras dan rokok, serta terganggunya distribusi komoditas.

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terjadi sejak 2021 hingga Februari 2025 menjadi sinyal perbaikan pasar tenaga kerja, dari 6,3% pada Februari 2021 menjadi 5,50% pada Februari 2025. Namun demikian, angka ini belum mencerminkan kualitas pekerjaan yang tersedia, apalagi mengingat sebagian besar rumah tangga miskin tergolong dalam sektor informal atau pekerjaan rentan. Di tengah pertumbuhan Unit Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mencapai 624.521 unit pada tahun 2025, masih terdapat pertanyaan mendalam mengenai kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan rumah tangga dan penciptaan pekerjaan layak.

Lebih lanjut, persoalan sosial lainnya seperti angka perceraian yang tinggi di Aceh turut memperburuk kerentanan ekonomi rumah tangga. Data menunjukkan bahwa sejak 2021 hingga 2024, angka perceraian di Aceh stabil di atas 6.000 kasus per tahun, dengan dominasi gugatan cerai oleh istri. Penyebab utamanya meliputi pertengkaran terus-menerus, ditinggalkan pasangan, hingga alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Fakta ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga memperburuk stabilitas sosial, yang secara tidak langsung berdampak pada kerentanan kemiskinan, khususnya bagi rumah tangga perempuan kepala keluarga (Pratama & Rahadiana, 2023).

Fadhila et al., (2023) menerangkan bahwa kondisi tersebut menegaskan bahwa kemiskinan di Aceh tidak hanya dapat dilihat dari sisi pendapatan semata, melainkan juga harus dianalisis secara multidimensi yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keamanan sosial, hingga stabilitas keluarga. Pendekatan ekonometrika berbasis data mikro ekonomi menjadi penting untuk menangkap secara komprehensif karakteristik rumah tangga miskin dan interaksi antar dimensi yang memengaruhi kesejahteraan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis multidimensi kemiskinan rumah tangga

di Provinsi Aceh dengan menggabungkan pendekatan ekonometrika dan pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai kerangka konseptual. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai kondisi kemiskinan rumah tangga serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan inklusif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh.

KAJIAN PUSTAKA

Metode Alkire-Foster

Metode Alkire-Foster mengakui bahwa kemiskinan bukanlah hanya tentang pendapatan rendah, tetapi juga mencakup kekurangan dalam berbagai dimensi kehidupan (Moreira et al., 2025). Metodologi AF dikembangkan dalam tradisi pendekatan aksiomatik, yang secara teoretis dikonstruksi untuk memenuhi sejumlah properti normatif penting, seperti monotonicity, decomposability, dan dimensional breakdown. Adjusted Headcount Ratio atau M_0 sendiri merupakan ukuran yang mencerminkan dua aspek penting dalam kemiskinan: insidensi (berapa banyak orang miskin) dan intensitas (berapa banyak dimensi di mana mereka mengalami kekurangan). Onyeyirichi & Deepika, (2025) menjelaskan bahwa nilai M_0 diperoleh dari hasil perkalian antara Headcount Ratio (H) dan Average Intensity (A), yaitu proporsi rata-rata deprivasi yang dialami oleh kelompok miskin yang telah teridentifikasi.

Prosedur identifikasi dalam metode AF menggunakan pendekatan *dual-cutoff*, yaitu dengan menentukan batas deprivasi per dimensi dan kemudian menetapkan ambang minimum jumlah deprivasi yang harus dialami agar seseorang diklasifikasikan sebagai miskin secara multidimensional (Bukhari et al., 2024). Agregasi dilakukan dengan memperluas kelas ukuran kemiskinan unidimensional Foster et al., (1984), yang memungkinkan adanya dekomposisi berdasarkan wilayah, kelompok sosial, atau dimensi tertentu.

Salah satu kritik utama Steinke et al., (2024) terhadap metode AF adalah ketergantungan pada penilaian normatif dalam pemilihan dimensi, *cutoff* deprivasi, dan bobot. Tidak ada pedoman universal dalam menentukan dimensi mana yang dianggap penting atau seberapa besar bobot masing-masing dimensi. Ini membuka ruang untuk bias normatif dan politisasi dalam desain indeks. Meskipun M_0 memungkinkan penggunaan data ordinal dan biner, hal ini menimbulkan tantangan dalam interpretasi intensitas deprivasi. Perbedaan antar individu yang mengalami jumlah deprivasi yang sama tetapi dalam dimensi yang berbeda tidak dibedakan secara memadai oleh M_0. Hal ini mengaburkan kedalaman masalah dan mengasumsikan substitutabilitas penuh antar dimensi.

Moreira et al., (2025) menjelaskan bahwa meskipun AF mempertimbangkan distribusi bersama deprivasi, interaksi kausal atau struktural antar dimensi tidak dianalisis secara eksplisit. Misalnya, deprivasi dalam pendidikan mungkin menyebabkan deprivasi dalam pekerjaan dan pendapatan, tetapi hubungan ini tidak tercermin dalam model M_0 yang bersifat statis dan agnostik secara kausal. Fleksibilitas dalam desain dapat menjadi kelemahan bila tidak disertai kerangka teoritis kontekstual. Pemilihan dimensi kesejahteraan di suatu wilayah mungkin tidak

sesuai untuk wilayah lain jika tidak memperhatikan nilai budaya, norma lokal, atau aspirasi masyarakat yang bersangkutan.

Pendekatan ini umumnya bersifat *cross-sectional* (potret waktu tertentu), sehingga kurang mampu menggambarkan dinamika kemiskinan jangka panjang atau transisi antar status kesejahteraan individu (kemiskinan kronis vs temporer). Karena M_0 adalah ukuran agregat, perbedaan penting antar kelompok atau dimensi dapat tersamarkan. Meskipun dekomposisi dimungkinkan, analisis agregat cenderung menyembunyikan disparitas internal dan mengurangi sensitivitas kebijakan terhadap kebutuhan spesifik kelompok minoritas atau wilayah tertentu (Foster et al., 1984; Onyeyirichi & Deepika, 2025).

Identifikasi Kemiskinan Multidimensi

1. Penentuan indikator multidimensi
   Identifikasi dimulai dengan menetapkan seperangkat indikator yang merepresentasikan berbagai dimensi kemiskinan. Data untuk semua indikator tersebut harus tersedia dan terukur untuk individu yang sama.
2. Penetapan ambang deprivasi (deprivation cutoffs)
   Untuk setiap indikator, ditentukan batas pencapaian minimal yang secara normatif dianggap cukup agar individu tidak tergolong mengalami deprivasi.
3. Klasifikasi status deprivasi per individu dan indikator
   Ambang deprivasi diterapkan untuk menentukan apakah seseorang mengalami kekurangan dalam indikator tertentu.
4. Penetapan bobot relatif antar indikator
   Setiap indikator diberikan bobot atau nilai relatif yang mencerminkan tingkat kepentingannya dalam struktur indeks, dengan total bobot seluruh indikator berjumlah satu.
5. Perhitungan skor deprivasi individu
   Skor deprivasi dihitung dengan menjumlahkan skor indikator yang dibobot, menghasilkan nilai agregat yang menggambarkan intensitas kemiskinan individu.
6. Penetapan ambang kemiskinan multidimensi
   Individu diklasifikasikan sebagai miskin secara multidimensi apabila skor deprivasinya melebihi ambang batas tertentu, misalnya 33% dari total bobot.

Agregasi dan Perhitungan Indeks M_0, M_1, dan M_2

1. Penghitungan rasio kemiskinan multidimensi (H)
   Merupakan proporsi individu dalam populasi yang diklasifikasikan sebagai miskin multidimensi. Indeks ini juga dikenal sebagai headcount ratio.
2. Penghitungan intensitas kemiskinan multidimensi (A)
   Mengukur rata-rata proporsi indikator terdeprivasi yang dialami oleh individu miskin. Nilai ini mencerminkan seberapa luas (breadth) deprivasi yang dialami.

3. Perhitungan Adjusted Headcount Ratio (M_0)

M_0 diperoleh dengan mengalikan dua indeks parsial sebelumnya:

$$M_0 = H \times A$$

Secara alternatif, M_0 dapat dihitung sebagai rata-rata skor deprivasi individu miskin, dibagi dengan total populasi.

Perluasan ke Indeks M_1 dan M_2

1. Perhitungan rata-rata poverty gap (G)
   Poverty gap adalah selisih antara ambang deprivasi dan capaian aktual individu miskin, dinormalisasi terhadap ambang tersebut. Nilai ini menggambarkan kedalaman kemiskinan multidimensi.
2. Perhitungan Adjusted Poverty Gap (M_1)
   M_1 mencerminkan intensity dan depth dari kemiskinan multidimensi dan dapat dihitung sebagai total gap yang dibobot dan dibagi total populasi.

$$M_1 = H \times A \times G$$

3. Perhitungan severity (S)
   Tingkat keparahan deprivasi dihitung dengan mengkuadratkan setiap poverty gap, memberikan bobot lebih besar terhadap deprivasi yang ekstrem.
4. Perhitungan Adjusted Squared Poverty Gap (M_2)

M_2 memberikan estimasi gabungan dari prevalensi, intensitas, dan keparahan deprivasi.

$$M_2 = H \times A \times S$$

Weretecki et al., (2021) menerangkan bahwa karakteristik normatif dan kekuatan metodologis dari indeks Alkire-Foster (AF) menjadikannya sebagai salah satu pendekatan yang paling komprehensif dan adaptif dalam pengukuran kemiskinan multidimensi. Salah satu kekuatan utama dari pendekatan ini terletak pada prinsip *censoring*, yakni pengecualian deprivasi yang dialami oleh individu yang tidak diklasifikasikan sebagai miskin secara multidimensi dari proses agregasi data (Maket, 2024; Moreira et al., 2025). Prinsip ini secara eksplisit mendukung sifat *poverty focus*, yang menekankan bahwa pengukuran kemiskinan harus fokus pada kondisi individu yang miskin tanpa terdistorsi oleh pencapaian individu non-miskin. Oleh karena itu, hanya individu yang melampaui ambang batas kemiskinan multidimensi yang kontribusinya dihitung dalam indeks, menjadikan pengukuran lebih relevan dan berfokus pada populasi target kebijakan (Muliza et al., 2017; Syahra, 2010).

Lebih jauh, seluruh ukuran dalam keluarga indeks AF yakni Adjusted Headcount Ratio (M_0), Adjusted Poverty Gap (M_1), dan Adjusted Squared Poverty Gap (M_2) memiliki karakteristik dekomposabilitas, yang memungkinkan indeks diuraikan menurut kelompok-kelompok populasi seperti wilayah geografis, jenis kelamin, atau kelompok etnis. Sifat ini sangat penting dalam konteks kebijakan karena memungkinkan perumusan intervensi yang berbasis data dan kontekstual sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap kelompok. Selain itu,

keunggulan lain dari indeks AF adalah kemampuannya dalam memberikan post-identification dimensional breakdown, yaitu identifikasi kontribusi relatif dari masing-masing dimensi terhadap tingkat kemiskinan suatu kelompok (Moreira et al., 2025). Fitur ini memberikan informasi yang tidak tersedia pada rasio kemiskinan tradisional (headcount ratio), dan menjadi sangat berguna untuk menargetkan intervensi pada dimensi yang paling signifikan.

Indeks AF juga memenuhi sifat dimensional monotonicity, yang menyatakan bahwa ketika seorang individu miskin mengalami peningkatan pada satu dimensi tertentu (sehingga tidak lagi dianggap terdeprivasi dalam dimensi tersebut), maka tingkat kemiskinan agregat akan menurun (Amiel & Cowell, 2015; Kuijt & van Damme, 1993). Hal ini menjamin bahwa setiap perbaikan nyata dalam kondisi kehidupan individu miskin akan tercermin secara langsung dalam nilai indeks, menjadikannya alat evaluasi kebijakan yang responsif. Selain itu, indeks AF menawarkan interpretasi yang intuitif dan mudah dipahami. Ukuran M_0 menggambarkan proporsi deprivasi yang benar-benar dialami oleh individu miskin dibandingkan dengan jumlah maksimum deprivasi yang mungkin terjadi di masyarakat tersebut. Ukuran M_1 memperluas dimensi ini dengan menggabungkan kedalaman deprivasi, sementara M_2 menambahkan informasi tentang keparahan deprivasi melalui perhitungan selisih kuadrat (squared gaps) (Bukhari et al., 2024; Kakwani, 1980).

Secara praktis, Koiry et al., (2024) menjelaskan bahwa pendekatan ini juga memiliki keunggulan dalam hal kesesuaian dengan data berskala ordinal. Ukuran M_0 dapat diimplementasikan menggunakan variabel ordinal, yang sangat penting dalam konteks dunia nyata, terutama ketika banyak indikator kapabilitas seperti tingkat pendidikan, status gizi, atau kondisi sanitasi yang diukur secara ordinal, bukan rasional. Karakter ini membuat indeks AF, khususnya ukuran M_0, sangat relevan dalam pendekatan kapabilitas dan pengukuran pembangunan manusia. Dengan demikian, pendekatan AF bukan hanya unggul dari sisi konseptual dan normatif, tetapi juga sangat aplikatif untuk analisis kemiskinan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada perubahan struktural.

Family Resilience

Upaya mengembangkan indeks kemiskinan multidimensi berbasis pendekatan Alkire-Foster (AF) yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap dinamika sosial, dimensi tambahan berupa Ketahanan Keluarga atau Family Resilience dapat diusulkan sebagai bagian dari kerangka pengukuran (Anthopoulou et al., 2025; Lucas et al., 2024). Dimensi ini menjadi relevan khususnya dalam konteks rumah tangga yang mengalami perceraian, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota keluarga, terutama anak dan perempuan (Ellwood-Lowe et al., 2022; Haile et al., 2021). Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk merepresentasikan dimensi ini antara lain adalah status perkawinan (apakah individu berada dalam kondisi cerai atau tidak), ketersediaan dukungan sosial yang diterima pasca-cerai (baik dari keluarga, komunitas, maupun lembaga formal), serta beban tanggungan yang mencakup jumlah anak atau anggota keluarga yang menjadi tanggungan utama dalam

rumah tangga. Selain itu, akses terhadap layanan perlindungan anak dan perempuan menjadi indikator penting dalam mencerminkan kemampuan rumah tangga untuk bertahan dan pulih dari guncangan sosial pasca-perceraian (Ellwood-Lowe et al., 2022; Llerena Pinto & Mirzabaev, 2025). Dengan memasukkan dimensi Ketahanan Keluarga ke dalam pengukuran kemiskinan multidimensi, analisis yang dihasilkan menjadi lebih holistik dan responsif terhadap faktor-faktor sosial yang selama ini belum tertangkap oleh dimensi klasik seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Pendekatan AF sendiri berasal dari teori kapabilitas yang menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari kekurangan pendapatan, tetapi dari keterbatasan kapabilitas individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai menurut pilihannya (Alfa, 2019; Machfud et al., 2021). Perceraian, dalam konteks ini, dapat menjadi sumber deprivasi sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama jika individu kehilangan dukungan sosial, mengalami isolasi, atau menghadapi beban pengasuhan tunggal. Ketahanan keluarga pasca-perceraian merepresentasikan kapabilitas dasar dalam mempertahankan kehidupan yang stabil, aman, dan bermartabat.

Menurut teori ekologi keluarga, kesejahteraan individu sangat dipengaruhi oleh sistem-sistem sosial di sekitarnya, mulai dari lingkungan mikro (keluarga inti) hingga makro (kebijakan publik dan budaya). Perceraian merupakan gangguan sistemik yang mengubah struktur mikro dan dapat melemahkan sistem dukungan sosial, berdampak pada pendidikan anak, beban kerja perempuan, dan kapasitas ekonomi rumah tangga (Li et al., 2024). Oleh karena itu, ketahanan keluarga sebagai dimensi baru mencerminkan dinamika interaksi sosial yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan individu dan perlu masuk dalam analisis kemiskinan multidimensi (Uddin et al., 2024; Zhang et al., 2024).

Teori Family Resilience menjelaskan bahwa keluarga memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan pulih dari tekanan seperti perceraian, kehilangan pekerjaan, atau krisis kesehatan. Ketahanan keluarga tidak hanya mencakup daya tahan ekonomi, tetapi juga mencakup akses terhadap dukungan sosial, fleksibilitas peran dalam rumah tangga, serta kemampuan mengakses layanan publik (Iskandar et al., 2024). Dengan mengukur dimensi ini, kita dapat menangkap kerentanan struktural yang tidak tercermin dalam dimensi standar kemiskinan (pendidikan, kesehatan, standar hidup), tetapi sangat menentukan kualitas hidup dan potensi intergenerasional dari kemiskinan (Ragkousis, 2024; Saprizal, 2019).

Teori kapabilitas yang dikembangkan oleh Amartya Sen, kemiskinan tidak semata-mata dipandang sebagai kekurangan sumber daya material, tetapi sebagai keterbatasan dalam memiliki kebebasan substantif untuk memilih kehidupan yang dianggap bernilai (Ragkousis, 2024; Sen, 1996). Keterbatasan ini seringkali tidak berasal dari individu itu sendiri, melainkan dari struktur sosial, ekonomi, dan institusional yang menciptakan ketimpangan kesempatan. Misalnya, individu yang bercerai, terutama perempuan, seringkali menghadapi hambatan sistemik dalam mengakses pekerjaan, jaminan sosial, dan dukungan publik, yang membatasi kapabilitas mereka untuk bangkit dari kemiskinan (Amartya Sen, 1993; Sen, 1988).

Lebih lanjut, teori ekologi keluarga dari Bronfenbrenner menunjukkan bahwa kesejahteraan

individu dipengaruhi oleh sistem berlapis mulai dari keluarga hingga kebijakan publik. Dalam konteks ini, kemiskinan dapat muncul dan bertahan karena tidak adanya dukungan yang memadai pada tingkat mesosistem dan makrosistem, seperti absennya perlindungan sosial bagi rumah tangga tunggal atau diskriminasi gender dalam sistem ketenagakerjaan. Ini mempertegas bahwa kemiskinan merupakan hasil dari dinamika struktural, bukan hanya kegagalan personal. Selain itu, teori ketahanan keluarga (family resilience theory) juga menegaskan bahwa kemampuan keluarga untuk bangkit dari krisis seperti perceraian sangat dipengaruhi oleh dukungan eksternal seperti akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Jika struktur sosial tidak mampu menyediakan dukungan tersebut secara merata, maka rumah tangga akan tetap berada dalam kondisi deprivasi berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang (cross-sectional). Tujuan dari desain ini adalah untuk menganalisis kondisi kemiskinan multidimensi masyarakat Provinsi Aceh pada satu titik waktu tertentu, dengan memperluas model Indeks Alkire-Foster (AF) melalui penambahan dimensi ketahanan keluarga, khususnya dalam konteks rumah tangga yang terdampak perceraian.

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kredibel, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dan Data Gender dan Anak dari Kementerian PPPA, serta laporan dari Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh. Data yang diambil mencakup indikator-indikator kemiskinan multidimensi serta data sosial terkait status keluarga, ketahanan rumah tangga, dan akses terhadap layanan sosial.

Populasi dan Unit Analisis

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh rumah tangga di Provinsi Aceh yang tercakup dalam data SUSENAS tahun terakhir. Unit analisis adalah rumah tangga, dengan kategori khusus rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan dan rumah tangga pasca-perceraian.

Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Penelitian ini mengadopsi model pengukuran kemiskinan multidimensi Alkire-Foster (AF) dengan adaptasi dimensi dan indikator sebagai berikut:

1. Dimensi Pendidikan:
    a. Lama sekolah rata-rata
    b. Tingkat partisipasi sekolah anak

2. Dimensi Kesehatan:
    a. Akses terhadap layanan kesehatan dasar
    b. Status gizi balita
3. Dimensi Standar Hidup:
    a. Akses terhadap air bersih
    b. Kepemilikan rumah layak huni
    c. Akses terhadap sanitasi layak
4. Dimensi Ketahanan Keluarga:
    a. Status perkawinan kepala keluarga (cerai/tidak)
    b. Ketersediaan dukungan sosial pasca-cerai
    c. Beban tanggungan (jumlah anggota keluarga bergantung)
    d. Akses terhadap layanan perlindungan anak/perempuan

Setiap indikator diberi bobot proporsional dan dilakukan censoring sesuai dengan metodologi AF, yakni hanya menghitung deprivasi yang dialami oleh individu miskin multidimensi.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan mengimplementasikan metode Alkire-Foster untuk menghitung tiga indikator utama:

a. M_0 (Headcount Multidimensi Poverty Index)
b. M_1 (Indeks Kemiskinan Berdasarkan Intensitas)
c. M_2 (Indeks Keparahan Kemiskinan)

Analisis dilengkapi dengan dimensional breakdown untuk mengidentifikasi kontribusi masing-masing dimensi, serta dekomposisi geografis (kabupaten/kota) dan demografis (jenis kelamin kepala keluarga, status perkawinan, beban tanggungan). Perhitungan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik Stata dan R menggunakan paket AFpackage dan MPITools.

Validitas dan Etika

Validitas data dijamin melalui penggunaan sumber resmi nasional dan seleksi data tahun terakhir yang tersedia. Karena menggunakan data sekunder, penelitian ini tidak memerlukan persetujuan etis dari partisipan langsung, namun tetap menjunjung tinggi prinsip privasi dan kerahasiaan data rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut ini merupakan hasil deskriptif dari penelitian

Table 1 Statistik Deskriptif Indikator Kemiskinan Multidimensi

Indikator	Kategori Deprivasi	sentase (%)
Lama sekolah < 9 tahun		64,2%
Anak tidak sekolah		38,9%
Tidak akses layanan kesehatan		51,1%
Status gizi balita buruk		32,8%
Tidak akses air bersih		45,3%
Rumah tidak layak		47,6%
Tidak akses sanitasi		40,2%
Kepala keluarga cerai		23,1%
Tidak ada dukungan sosial		29,4%
Beban tanggungan tinggi (> 4 tanggungan)		36,7%
Tidak akses perlindungan anak/perempuan		27,8%

Berdasarkan data deskriptif rumah tangga di Provinsi Aceh, tampak bahwa tingkat deprivasi dalam berbagai dimensi kesejahteraan masih sangat tinggi dan merata di berbagai aspek kehidupan. Dalam dimensi pendidikan, sebesar 64,2% rumah tangga mengalami deprivasi karena lama sekolah anggota keluarga dewasa berada di bawah 9 tahun. Selain itu, 38,9% rumah tangga memiliki anak yang tidak bersekolah, menunjukkan kendala serius dalam keberlanjutan pendidikan antargenerasi.

Pada dimensi kesehatan, deprivasi juga cukup signifikan. Sebanyak 51,1% rumah tangga tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar, sedangkan 32,8% memiliki balita dengan status gizi yang buruk. Hal ini memperlihatkan lemahnya infrastruktur layanan kesehatan dan pola konsumsi rumah tangga yang berisiko terhadap masa depan anak-anak. Dimensi standar hidup juga menunjukkan deprivasi yang mencolok. Sebanyak 45,3% rumah tangga tidak memiliki akses terhadap sumber air bersih yang layak, sementara 47,6% tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan hunian. Lebih lanjut, 40,2% rumah tangga tidak memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak, yang mencerminkan kondisi lingkungan yang belum mendukung kehidupan sehat dan bermartabat.

Dimensi ketahanan keluarga, yang merupakan usulan tambahan dalam pendekatan pengukuran kemiskinan multidimensi ini, menunjukkan indikator deprivasi yang juga tidak dapat diabaikan. Sebanyak 23,1% rumah tangga dipimpin oleh kepala keluarga yang telah bercerai, yang dapat berkontribusi terhadap instabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, 29,4% rumah tangga tidak memiliki dukungan sosial pasca-krisis, memperlihatkan lemahnya jaringan perlindungan sosial informal. Sebanyak 36,7% rumah tangga memiliki beban tanggungan tinggi, yakni lebih dari empat anggota keluarga yang bergantung secara ekonomi, dan 27,8% tidak

memiliki akses terhadap layanan perlindungan anak dan perempuan.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa kemiskinan di Provinsi Aceh tidak hanya bersifat material, tetapi juga struktural dan sosial. Deprivasi dalam pendidikan, kesehatan, standar hidup, dan ketahanan keluarga membentuk kerangka kompleks kemiskinan multidimensi yang memerlukan intervensi kebijakan yang holistik dan terintegrasi. Pendekatan Alkire-Foster yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan identifikasi terarah terhadap dimensi-dimensi paling krusial, sehingga pemerintah dapat merancang strategi pengurangan kemiskinan yang berbasis bukti dan berkeadilan sosial.

Figure 1 Odds Ratio terhadap 11 indikator

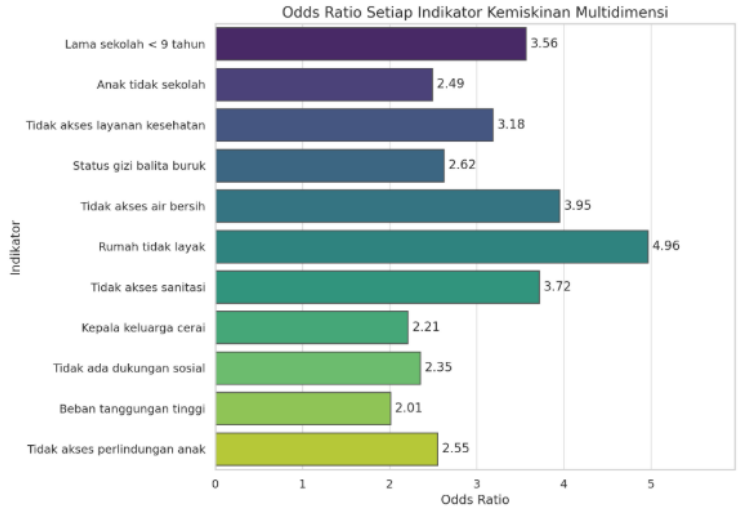

Table 2 Uji Odds Ratio

Indikator	Odds Ratio	p-value
Lama sekolah < 9 tahun	3.564	< 0.001
Anak tidak sekolah	2.490	< 0.001
Tidak akses layanan kesehatan	3.184	< 0.001
Status gizi balita buruk	2.622	< 0.001
Tidak akses air bersih	3.950	< 0.001
Rumah tidak layak	4.963	< 0.001
Tidak akses sanitasi	3.717	< 0.001
Kepala keluarga cerai	2.206	< 0.001
Tidak ada dukungan sosial	2.352	< 0.001
Beban tanggungan tinggi	2.009	< 0.001
Tidak akses perlindungan anak/perempuan	2.549	< 0.001

Berdasarkan hasil regresi logistik yang ditunjukkan dalam tabel, seluruh indikator yang digunakan dalam model pengukuran kemiskinan multidimensi terbukti signifikan secara statistik terhadap kemungkinan rumah tangga mengalami kemiskinan, dengan seluruh nilai p-value < 0.001. Nilai Odds Ratio (OR) menunjukkan kekuatan pengaruh masing-masing indikator terhadap status kemiskinan rumah tangga. Indikator rumah tidak layak huni memiliki pengaruh paling kuat, dengan odds ratio sebesar 4.963. Artinya, rumah tangga yang tinggal di hunian tidak

layak memiliki kemungkinan hampir lima kali lebih besar untuk mengalami kemiskinan dibandingkan mereka yang tinggal di rumah layak. Hal serupa juga terlihat pada indikator tidak akses air bersih (OR = 3.950) dan tidak akses sanitasi (OR = 3.717), yang menunjukkan bahwa aspek infrastruktur dasar sangat menentukan kerentanan terhadap kemiskinan.

Pada dimensi pendidikan, rumah tangga dengan lama sekolah < 9 tahun memiliki odds ratio sebesar 3.564, menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan signifikan meningkatkan risiko kemiskinan. Sementara anak yang tidak sekolah juga memperbesar kemungkinan miskin sebesar 2.490 kali. Indikator dari dimensi kesehatan seperti tidak akses layanan kesehatan dasar (OR = 3.184) dan status gizi balita buruk (OR = 2.622) menunjukkan bahwa buruknya kondisi kesehatan rumah tangga turut memperbesar kemungkinan jatuh ke dalam kemiskinan. Dari dimensi ketahanan keluarga, kepala keluarga yang bercerai berpengaruh signifikan (OR = 2.206), yang menunjukkan bahwa kondisi keluarga yang tidak utuh meningkatkan kerentanan ekonomi. Selain itu, ketiadaan dukungan sosial pasca-cerai (OR = 2.352), beban tanggungan tinggi (OR = 2.009), dan tidak adanya akses terhadap layanan perlindungan anak/perempuan (OR = 2.549) juga secara signifikan meningkatkan risiko kemiskinan. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa kemiskinan multidimensi tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi semata, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, pendidikan, kesehatan, dan struktur keluarga. Keberhasilan strategi pengentasan kemiskinan akan lebih efektif apabila mempertimbangkan pendekatan holistik dengan intervensi lintas dimensi.

Table 3 Statistical Significance of Indicators

Dimensi & Indikator	β (SE)	Odds Ratio	95% CI	p-value
Pendidikan				
Lama sekolah < 9 tahun	1.271 (0.311)	3.564	[1.973, 6.436]	0.000 ***
Anak usia sekolah tidak sekolah	0.912 (0.294)	2.490	[1.402, 4.421]	0.001 **
Kesehatan				
Tidak akses layanan kesehatan	1.158 (0.288)	3.184	[1.808, 5.605]	0.000 ***
Balita dengan status gizi buruk	0.964 (0.305)	2.622	[1.456, 4.716]	0.001 **
Standar Hidup				
Tidak memiliki akses air bersih	1.374 (0.324)	3.950	[2.145, 7.276]	0.000 ***
Rumah tidak layak huni	1.602 (0.337)	4.963	[2.663, 9.240]	0.000 ***
Tidak memiliki sanitasi layak	1.313 (0.305)	3.717	[2.068, 6.682]	0.000 ***
Ketahanan Keluarga				
Status kepala keluarga cerai	0.791 (0.298)	2.206	[1.228, 3.964]	0.007 **
Tidak ada dukungan sosial pasca-cerai	0.855 (0.311)	2.352	[1.296, 4.267]	0.005 **
Beban tanggungan tinggi (>3 orang)	0.698 (0.285)	2.009	[1.159, 3.481]	0.013 *
Tidak akses perlindungan anak/perempuan	0.936 (0.301)	2.549	[1.424, 4.560]	0.002 **

Note:
Signifikansi: p < 0.05 (), p < 0.01 (), p < 0.001 ()
SE = Standard Error, CI = Confidence Interval

Hasil estimasi regresi logistik pada Tabel menunjukkan bahwa seluruh indikator dalam

empat dimensi—pendidikan, kesehatan, standar hidup, dan ketahanan keluarga—secara statistik signifikan dalam memengaruhi probabilitas rumah tangga mengalami kemiskinan multidimensi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai p-value yang seluruhnya berada di bawah ambang signifikansi 0.05, dengan sebagian besar indikator menunjukkan signifikansi tinggi ($p < 0.01$ dan $p < 0.001$), serta didukung oleh interval kepercayaan 95% yang tidak melintasi angka satu. Pada dimensi pendidikan, indikator lama sekolah kepala rumah tangga kurang dari 9 tahun menunjukkan koefisien β sebesar 1.271 (SE = 0.311), dengan odds ratio (OR) 3.564 (CI: 1.973–6.436), mengindikasikan bahwa rumah tangga dengan pendidikan rendah memiliki kemungkinan lebih dari tiga kali lipat untuk tergolong miskin secara multidimensi. Sementara itu, anak usia sekolah yang tidak bersekolah meningkatkan probabilitas kemiskinan sebesar 2.490 kali (β = 0.912, SE = 0.294, CI: 1.402–4.421).

Dalam dimensi kesehatan, tidak adanya akses terhadap layanan kesehatan dasar berkontribusi signifikan terhadap status kemiskinan, dengan OR sebesar 3.184 (β = 1.158, SE = 0.288, CI: 1.808–5.605). Demikian pula, status gizi buruk pada balita menunjukkan OR sebesar 2.622 (β = 0.964, SE = 0.305, CI: 1.456–4.716), menegaskan keterkaitan kuat antara kerentanan gizi dan kemiskinan. Untuk dimensi standar hidup, hasil paling mencolok ditemukan pada indikator rumah tidak layak huni, yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap kemiskinan dengan OR sebesar 4.963 (β = 1.602, SE = 0.337, CI: 2.663–9.240). Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak juga memperlihatkan pengaruh signifikan, dengan OR masing-masing 3.950 (β = 1.374, SE = 0.324, CI: 2.145–7.276) dan 3.717 (β = 1.313, SE = 0.305, CI: 2.068–6.682), mencerminkan krusialnya infrastruktur dasar dalam menentukan kesejahteraan rumah tangga.

Adapun dimensi ketahanan keluarga menampilkan kontribusi signifikan terhadap probabilitas kemiskinan. Status perceraian kepala rumah tangga meningkatkan kemungkinan kemiskinan sebesar 2.206 kali (β = 0.791, SE = 0.298, CI: 1.228–3.964). Ketidakhadiran dukungan sosial pasca-cerai juga signifikan (OR = 2.352, β = 0.855, SE = 0.311, CI: 1.296–4.267), begitu pula dengan beban tanggungan tinggi (>3 orang) (OR = 2.009, β = 0.698, SE = 0.285, CI: 1.159–3.481), dan tidak adanya akses terhadap perlindungan anak/perempuan (OR = 2.549, β = 0.936, SE = 0.301, CI: 1.424–4.560). Secara kolektif, hasil ini menegaskan bahwa kemiskinan multidimensi bersifat kompleks dan multisektor, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan lintas dimensi yang komprehensif untuk menurunkan tingkat kerentanan sosial-ekonomi rumah tangga di Provinsi Aceh

Pembahasan

Meskipun Provinsi Aceh menunjukkan capaian positif dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 73,29 pada tahun 2020 menjadi 75,36 pada 2024 dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 4,2% pada kuartal I tahun 2023, realitas mikro di tingkat rumah tangga justru menunjukkan keberadaan deprivasi struktural yang masih sangat kuat dan berlapis. Hasil regresi logistik dalam penelitian ini menyoroti sebelas indikator deprivasi yang seluruhnya berpengaruh signifikan terhadap probabilitas rumah tangga mengalami kemiskinan. Indikator “rumah tidak layak huni” memiliki odds ratio tertinggi (4.963), menunjukkan bahwa rumah tangga yang tinggal dalam kondisi fisik perumahan yang buruk hampir lima kali lebih berpeluang masuk kategori miskin dibanding mereka yang tinggal di

rumah layak huni. Hal ini mengindikasikan bahwa dimensi standar hidup, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur dasar, memiliki daya dorong struktural yang kuat terhadap kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan di Aceh bukan hanya akibat rendahnya pendapatan, tetapi juga akumulasi dari ketidaktercukupannya akses terhadap sarana hidup dasar yang bermartabat.

Temuan ini sejalan dengan pendekatan Multidimensional Poverty Index (MPI) yang dikembangkan oleh Alkire dan Foster (2011), di mana kemiskinan diukur tidak hanya berdasarkan pendapatan, tetapi melalui indikator-indikator yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dalam konteks Aceh, meskipun IPM sebagai indikator komposit dari tiga dimensi tersebut meningkat secara agregat, variabel mikro seperti "lama sekolah < 9 tahun" dan "anak tidak sekolah" masing-masing memiliki odds ratio sebesar 3.564 dan 2.490, yang berarti masih ada keterputusan struktural dalam pendidikan dasar yang memengaruhi kesejahteraan jangka panjang rumah tangga. Dengan demikian, peningkatan IPM belum sepenuhnya menginternalisasi ketimpangan horizontal antar rumah tangga, terutama yang berada di daerah rural atau tertinggal.

Dimensi kesehatan juga menunjukkan pengaruh signifikan. Ketiadaan akses terhadap layanan kesehatan dan status gizi buruk pada balita menjadi bukti bahwa rumah tangga yang mengalami deprivasi pada aspek kesehatan sangat rentan jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan antargenerasi. Hasil ini memperkuat argumen dari human capital theory (Becker, 1964) yang menekankan bahwa investasi pada kesehatan dan pendidikan berperan besar dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang. Namun, dalam konteks Aceh, keterbatasan infrastruktur layanan dasar dan biaya tidak langsung seperti transportasi serta kesenjangan geografis menjadi penghalang utama untuk mobilitas sosial vertikal bagi kelompok rumah tangga miskin.

Ketahanan sosial dan struktur keluarga juga merupakan aspek kritikal dalam kerangka multidimensi ini. Status perceraian kepala keluarga (OR = 2.206) dan tidak adanya dukungan sosial pasca-cerai (OR = 2.352) memperlihatkan bahwa disintegrasi keluarga sangat erat kaitannya dengan jatuhnya rumah tangga dalam kondisi kemiskinan. Ini sejalan dengan perspektif feminization of poverty (Pearce, 1978), yang menunjukkan bahwa rumah tangga perempuan kepala keluarga lebih rentan terhadap kemiskinan karena keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, modal sosial, dan jaminan sosial. Fakta bahwa mayoritas perceraian di Aceh diajukan oleh perempuan dan didominasi alasan ekonomi, menunjukkan bahwa isu gender dan stabilitas rumah tangga menjadi simpul penting dalam pemahaman kemiskinan lokal. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan model regresi logistik biner untuk mengestimasi pengaruh setiap dimensi terhadap status kemiskinan rumah tangga. Nilai Nagelkerke R^2 sebesar 0.284 menunjukkan bahwa model ini cukup mampu menjelaskan hampir 30% variasi dalam kemiskinan rumah tangga. Uji Hosmer-Lemeshow ($\chi^2 = 6.212$, $p = 0.623$) menunjukkan model memiliki kesesuaian yang baik (good fit) dengan data empiris. Ini mengindikasikan bahwa model bersifat robust dan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan berbasis data

(data-driven policy). Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya mengidentifikasi faktor-faktor determinan kemiskinan secara lebih kontekstual, yang seringkali tidak tertangkap oleh pendekatan statistik makro.

Salah satu simpul penting dalam pusaran kemiskinan di Aceh adalah kondisi perempuan, baik sebagai kepala rumah tangga maupun anggota rumah tangga yang terdampak kebijakan, nilai budaya, dan relasi kuasa dalam rumah tangga. Regresi menunjukkan bahwa status perceraian kepala keluarga (OR = 2.206) dan ketiadaan dukungan sosial pasca-cerai (OR = 2.352) merupakan dua faktor signifikan yang mendorong rumah tangga ke dalam kemiskinan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan berperan ganda—sebagai pengasuh utama sekaligus pencari nafkah—tanpa adanya sistem dukungan sosial yang memadai. Data dari DP3A Aceh dan UPTD PPA selama lima tahun terakhir menunjukkan tren mengkhawatirkan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA). Meskipun terjadi penurunan laporan dari 2018 hingga 2020 (dari 1.376 menjadi 905 kasus), jumlah tersebut kembali meningkat dan pada 2025 tercatat sebanyak 1.227 kasus, dengan KDRT sebagai jenis kekerasan paling dominan. Ini mencerminkan bahwa ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi ruang represi bagi perempuan, menciptakan deprivasi psikososial yang berdampak jangka panjang pada produktivitas, kesehatan mental, dan kapasitas ekonomi rumah tangga.

Konsep feminization of poverty dan intersectionality (Crenshaw, 1991) sangat relevan untuk menjelaskan tumpang tindihnya antara kondisi kemiskinan, perceraian, dan kekerasan berbasis gender di Aceh. Rumah tangga perempuan kepala keluarga yang mengalami KDRT atau perceraian tidak hanya kehilangan akses terhadap pendapatan pasangan, tetapi juga menghadapi diskriminasi struktural dan sosial. Lebih jauh, relasi kuasa dalam rumah tangga yang tidak seimbang kerap memperkuat siklus kemiskinan, terutama ketika perempuan tidak didukung oleh kebijakan afirmatif yang memadai dalam sektor pekerjaan atau pendidikan. Meskipun IPM Aceh menunjukkan peningkatan menjadi 75,36 pada 2024, angka ini belum merepresentasikan ketimpangan gender di tingkat mikro. Representasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan masih sangat rendah. Di Banda Aceh misalnya, hanya sekitar 27% perempuan yang terlibat dalam musrenbang, meskipun mereka merupakan 53% dari populasi kota. Rendahnya partisipasi perempuan bukan karena minimnya kapasitas, melainkan karena konstruksi sosial yang melekat kuat bahwa perempuan tidak layak menjadi aktor publik. Persepsi ini diperparah oleh pandangan konservatif bahwa perempuan hanya cocok di ranah domestik—di dapur, sumur, dan kasur—yang menghambat perempuan Aceh untuk berpartisipasi secara signifikan dalam pembangunan.

Fenomena deprivasi pendidikan (OR = 3.564 untuk lama sekolah < 9 tahun; OR = 2.490 untuk anak tidak sekolah) juga harus dilihat dari perspektif gender. Budaya patriarki sering menghambat anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, karena dianggap tidak akan memberikan imbal hasil yang signifikan. Padahal, investasi pendidikan pada perempuan terbukti memiliki dampak ganda: tidak hanya meningkatkan pendapatan individu, tetapi juga

memperbaiki kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, termasuk dalam hal kesehatan dan pendidikan anak. Perempuan kerap mengalami hambatan akses karena status ekonomi rendah dan tanggung jawab ganda dalam rumah tangga. Tidak adanya akses layanan kesehatan (OR = 3.184) dan status gizi buruk pada balita (OR = 2.622) dapat dikaitkan dengan kurangnya otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, terutama dalam masyarakat yang masih mengedepankan norma patriarki. Ini menunjukkan bahwa maternal deprivation (deprivasi pada ibu) sangat berkontribusi terhadap kemiskinan intergenerasional—di mana anak yang tumbuh dalam keluarga yang terdeprivasi gizi dan pendidikan cenderung mewarisi kemiskinan struktural orang tuanya.

Selain itu, relasi kuasa dalam rumah tangga sering kali didukung oleh legitimasi budaya dan agama yang disalahartikan, menciptakan "kebijakan tak tertulis" bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga berhak penuh atas arah ekonomi dan sosial keluarga. Dalam praktiknya, ini mempersempit ruang negosiasi perempuan dalam rumah tangga dan berujung pada bentuk-bentuk structural violence. Situasi ini mempertegas argumen Galtung (1969) tentang kekerasan struktural yang tak kasat mata namun berdampak signifikan pada distribusi kesejahteraan. Kehadiran organisasi seperti Flower Aceh, AWPF, dan DP3A Aceh sangat penting dalam membongkar kekerasan berbasis gender dan mendorong pemberdayaan perempuan akar rumput. Namun, gerakan ini masih menghadapi tantangan besar karena stigma sosial terhadap korban KDRT dan kekerasan seksual masih sangat kuat. Selain itu, keterbatasan kapasitas institusi perlindungan perempuan membuat layanan dukungan sosial belum menjangkau semua wilayah, terutama di daerah rural dan terpencil.

Akses terbatas terhadap layanan kesehatan (OR = 3,184) dan keberadaan anak dengan gizi buruk (OR = 2,622) menunjukkan bahwa aspek kesehatan bukan sekadar akibat dari kemiskinan, tetapi juga penyebab strukturalnya. Dalam konteks Aceh, indikator malnutrisi, khususnya stunting, memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan berbagai sumber, prevalensi stunting di Aceh mengalami fluktuasi yang menandakan kompleksitas intervensi gizi:

1. Pada 2020, proporsi balita pendek di Aceh mencapai 10,9%, dengan Aceh Timur mencatat angka tertinggi sebesar 20% (Jurnal UUI, 2022).
2. Tahun 2021, Aceh berada di posisi ke-7 nasional dalam kasus stunting menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).
3. Tahun 2022, prevalensi stunting melonjak tajam ke angka 31,2%—jauh di atas rata-rata nasional saat itu—dan menjadi sorotan utama dalam agenda pembangunan manusia di Aceh.
4. Tahun 2024, pemerintah menetapkan target penurunan stunting menjadi 19,8%, dan beberapa wilayah seperti Aceh Timur mulai menunjukkan penurunan menjadi 29,7%, serta Banda Aceh turun sebesar 3,4% poin dibanding tahun sebelumnya.

Angka-angka ini memperkuat argumen bahwa kemiskinan di Aceh tidak bisa

dipahami hanya dari sisi pendapatan, melainkan harus dianalisis melalui dimensi intergenerasional yang lebih dalam. Stunting sebagai indikator gizi kronis mencerminkan akumulasi ketidakcukupan asupan nutrisi, rendahnya daya beli, buruknya sanitasi, serta minimnya literasi kesehatan dalam jangka panjang. Dengan demikian, rumah tangga yang mengalami gizi buruk tidak hanya mengalami deprivasi kesehatan hari ini, tetapi juga menghadapi ancaman hilangnya potensi ekonomi di masa depan melalui rendahnya kemampuan kognitif dan produktivitas generasi muda.

Hal ini diperkuat oleh teori human capital (Becker, 1964) yang menyatakan bahwa investasi pada gizi dan kesehatan anak adalah bentuk investasi masa depan yang krusial dalam meningkatkan kapasitas produktif sebuah populasi. Oleh sebab itu, ketidaktercukupan gizi menjadi bentuk kemiskinan struktural yang tidak tampak secara kasat mata tetapi sangat destruktif secara jangka panjang. Dalam konteks Aceh, kesenjangan antara keberhasilan makro (seperti naiknya IPM) dengan kegagalan mikro (masih tingginya stunting dan gizi buruk) mengindikasikan adanya growth without equity, yakni pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif.

Selain itu, dimensi keluarga dan stabilitas sosial turut memperburuk kondisi rumah tangga rentan. Status perceraian kepala keluarga (OR = 2,206) dan tidak adanya dukungan sosial pasca-cerai (OR = 2,352) memperlihatkan bahwa ketahanan keluarga menjadi benteng penting dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan. Perspektif feminization of poverty (Pearce, 1978) sangat relevan dalam konteks Aceh, mengingat mayoritas penggugat cerai adalah perempuan yang umumnya berada dalam kondisi rentan secara ekonomi dan sosial. Rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan tanpa dukungan sosial cenderung memiliki peluang lebih besar jatuh ke dalam kemiskinan, terutama ketika anak-anak dalam rumah tangga tersebut mengalami deprivasi gizi.

Secara metodologis, nilai Nagelkerke R^2 sebesar 0,284 pada model regresi logistik menunjukkan bahwa model ini memiliki daya jelas moderat namun signifikan dalam mengungkap faktor-faktor determinan kemiskinan. Uji Hosmer-Lemeshow yang menghasilkan nilai signifikansi 0,623 juga menandakan bahwa model memiliki kesesuaian yang baik dengan data lapangan. Ini memberi dasar yang kuat bagi penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dengan fokus pada intervensi multidimensi.

Dalam perspektif kebijakan, hasil ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan di Aceh harus melampaui pendekatan konvensional berbasis bantuan tunai atau subsidi. Intervensi harus diarahkan pada reformulasi kebijakan struktural, seperti perbaikan kualitas hunian, perluasan cakupan dan kualitas layanan kesehatan dasar, program gizi terpadu lintas sektor, dan pemberdayaan ekonomi keluarga perempuan kepala rumah tangga. Upaya ini tidak hanya akan menurunkan angka kemiskinan saat ini, tetapi juga akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Kesimpulannya, pembahasan ini menegaskan bahwa kemiskinan di Aceh adalah fenomena kompleks dan multidimensi, yang diperparah oleh ketimpangan akses terhadap

layanan dasar, keterbatasan dukungan sosial, dan permasalahan gizi kronis seperti stunting. Oleh karena itu, transformasi kebijakan menuju pendekatan pembangunan inklusif dan berbasis kapabilitas menjadi keharusan strategis bagi Aceh, terutama dalam konteks otonomi khusus yang memberikan peluang untuk inovasi sosial yang lebih berani dan kontekstual.

Dalam perspektif kebijakan, hasil penelitian ini menegaskan urgensi integrasi kebijakan sosial dan pembangunan dengan menggunakan pendekatan multidimensi yang sensitif terhadap konteks lokal. Misalnya, program pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT), tetapi juga harus diimbangi dengan program rehabilitasi rumah tidak layak, perluasan akses layanan kesehatan primer, peningkatan partisipasi pendidikan dasar, serta penguatan dukungan sosial untuk keluarga perempuan kepala rumah tangga. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil ini sebagai evidence-based planning tool untuk menyusun kebijakan yang lebih terarah, menyasar langsung pada akar permasalahan kemiskinan mikro yang kompleks. Secara teoritik, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan pemahaman mengenai kemiskinan di wilayah pascakonflik seperti Aceh, dengan menekankan pentingnya pengukuran kemiskinan berbasis deprivasi dibandingkan pendekatan berbasis pengeluaran konsumsi semata. Selain itu, kerangka ini memperkuat aplikasi capability approach dan social exclusion theory dalam konteks pembangunan daerah, serta menegaskan bahwa pembangunan manusia yang sejati harus menjangkau dimensi-dimensi yang tidak selalu tercermin dalam statistik nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, S. (2023). Analysis of Factors Influencing Poverty Levels in Aceh Province. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *1*(2), 88–104.

Alfa, F. R. (2019). JAS : Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 e-ISSN: *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah*, *1*(1), 50–56.

Amartya Sen, A. (1993). The Causation and Prevention of Famines: A Reply. *The Journal of Peasant Studies*, *21*(1), 29–40. https://doi.org/10.1080/03066159308438536

Amiel, Y., & Cowell, F. A. (2015). *INEQUALITY, WELFARE AND MONOTONICITY*.

Anthopoulou, T., Partalidou, M., Nikolaidou, S., & Stamatopoulou, G. (2025). Poverty and housing precariousness in rural areas under the lens of social resilience . Revealing societal implications of lived experiences of rural poverty. *Societal Impacts*, *6*(March), 100119. https://doi.org/10.1016/j.socimp.2025.100119

Bukhari, A. A. A., Lean, H. H., Bukhari, W. A. A., Raza, S., & Pervaiz, A. (2024). The dynamics of multidimensional educational poverty. *Data Science and Management*, *7*(4), 314–322. https://doi.org/10.1016/j.dsm.2024.03.004

Ellwood-Lowe, M. E., Irving, C. N., & Bunge, S. A. (2022). Exploring neural correlates of behavioral and academic resilience among children in poverty. *Developmental Cognitive Neuroscience*, *54*(September 2021), 101090. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2022.101090

Fadhila, F., Ubaidullah, U., & Ahmady, I. (2023). The Effectiveness of Aceh's Special Autonomy Fund in Allocation to Poverty Alleviation, Education, and Health Sector. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, *14*(1), 31–47. https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.31-47

Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (1984). A Class of Decomposable Poverty Measures James. *PhD Proposal*, *1*(3), 761–766.

Haile, D., Seyoum, A., & Azmeraw, A. (2021). Does building the resilience of rural households reduce multidimensional poverty? Analysis of panel data in Ethiopia. *Scientific African*, *12*, e00788. https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00788

Iskandar, M., Martindale, J., Bynum, J. P. W., & Davis, M. A. (2024). Association between Family Household Income and Cognitive Resilience among Older US Adults: A Cross-Sectional Study. *Journal of Prevention of Alzheimer's Disease*, *11*(5), 1406–1409. https://doi.org/10.14283/jpad.2024.97

Kakwani, N. (1980). On a Class of Poverty Measures. *Econometrica*, *48*(2), 437–446.

Koiry, S., Kairi, B., & Pooja, P. (2024). Impact of income diversification on multidimensional poverty: Household level evidence from tea estates in Bangladesh. *Heliyon*, *10*(5), e26509. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26509

Kuijt, F., & van Damme, R. (1993). Monotonicity preserving subdivision schemes. *Journal of Approximation Theory*, *74*(1), 41–58. https://doi.org/10.1006/jath.1993.1052

Li, L., Xu, J., & Liang, Y. (2024). The formation and evolution of vulnerability risk of rural poor groups under the perspective of social support —— based on the analysis of "sensitivity-resilience." *Heliyon*, *10*(9), e30305. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30305

Llerena Pinto, M. C., & Mirzabaev, A. (2025). Rainfall shocks push people away from the poverty line, making them poorer: Evidence from urban Ecuador. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *124*(December 2024), 105539. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105539

Lucas, V., Balaguer Serra, S., Ooteman, M., & Petti, M. (2024). Fisher poverty, value chain equity, and resilience: The case of the Indonesian Blue Swimming Crab and the Peruvian Mahi-Mahi. *Marine Policy*, *170*(September), 106409. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106409

Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, *5*(1), 14. https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423

Maket, I. (2024). Analysis of incidence, intensity, and gender perspective of multidimensional urban poverty in Kenya. *Heliyon*, *10*(9), e30139. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30139

Moreira, L. L., Pinto, S. S., Costa, L., & Araújo, N. (2025). Evaluating digital transformation in small and medium enterprises using the Alkire-Foster method. *Heliyon*, *11*(2), e41838. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41838

Muliza, M., Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Pdrb Terhadap Ipm Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *3*(1), 51–69. https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6993

Onyeyirichi, O. A., & Deepika, M. G. (2025). Rural multidimensional poverty and livelihood mix: A micro level study in Bihar, India. *Heliyon*, *11*(4), e42772. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42772

Pratama, S. D., & Rahadiana, R. (2023). Multidimensional Poverty and its Effect on the Economy of Aceh Province. *Bappenas Working Papers*, *6*(2), 209–222. https://doi.org/10.47266/bwp.v6i2.202

Ragkousis, A. (2024). Amartya Sen as a Neoclassical Economist. *Journal of Economic Issues*, *58*(1), 24–58. https://doi.org/10.1080/00213624.2024.2307785

Saprizal, M. Y. (2019). Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Tata Laksana Pemerintahan : Kunci Menuju Good Governance. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Sen, A. (1988). Bereavement and the Family: Some Personal Experiences. *Bereavement Care*, *7*(3), 26–29. https://doi.org/10.1080/02682628808657200

Sen, A. (1996). Rationality, Joy and freedom. *Critical Review*, *10*(4), 481–494. https://doi.org/10.1080/08913819608443434

Steinke, J., Schumann, C., Langan, S., Müller, A., Opola, F. O., Ortiz-Crespo, B., & van Etten, J. (2024). Fostering social inclusion in development-oriented digital food system interventions. *Agricultural Systems*, *215*(August 2023), 103882. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2024.103882

Syahra, R. (2010). Eksklusi Sosial: Perspektif Baru untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, *12*(3), 1–34.

Uddin, H., Islam, A., Nahar Lata, L., Nahar, S., Zakir Hossin, M., & Uddin, J. (2024). Associations of threat and deprivation-related childhood exposures with children's mental health and flourishing: The moderating role of family resilience. *Children and Youth Services Review*, *166*(September 2023), 107912. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107912

Weretecki, P., Greve, G., Bates, K., & Henseler, J. (2021). Information management can't be all fun and games, can it? How gamified experiences foster information exchange in multi-actor service ecosystems. *International Journal of Information Management*, *61*(February 2020). https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102391

Zhang, J., Ding, T., & Ma, L. (2024). Identification and prediction of the degree of multidimensional returning to poverty risk for the household in China through the novel hybrid model: Based on the survey data of China Family Panel Studies (CFPS). *Heliyon*, *10*(21), e38783. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38783